

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**1.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian menggunakan referensi dari penelitian terdahulu untuk dijadikan perbedaan atau rujukan dalam melakukan penelitian, adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Judul/Penulis/Tahun	Hasil Penelitian	Perbandingan
1	Ririn Rosita Hur, Toni Ruchimat, Yenni Nuraini (2020) dengan judul, Analisis Potensi dan Permasalahan Pengembangan Wilayah Pesisir di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecamatan Arosbaya merupakan kawasan potensial baik di bidang usaha perikanan dan ekosistem mangrove yang terbentang didalamnya. Pada pengembangan potensi tersebut, ditemukan beberapa	Persamaan penelitian tersebut yaitu terletak pada pengembangan wilayah yang melibatkan pada potensi daerahnya. Perbedaanya yaitu pada tempat penelitian dan potensi daerahnya.

	Provinsi Jawa Timur.	permasalahan terkait dibidang usaha perikanan ataupun pada pelestarian ekosistem yang ada. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mewujudkan pengelolaan dan pengembangan secara <i>co-management</i>	
2	Andi Muliani Sultani (2016) dengan judul, Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan wilayah berbasis ekonomi kabupaten barru memiliki keragaman sektor perekonomian yang cukup baik. Sektor pertanian yang merupakan	Persamaan penelitian tersebut yaitu terletak pada pengembangan wilayah yang melibatkan pada potensi daerahnya. Perbedaanya yaitu pada tempat penelitian dan potensi daerahnya.

		<p>unggulan dan menjadi aktivitas perekonomian primer di Kabupaten Barru tidak diimbangi oleh aktivitas sektor industri pengolahan.</p>	
3	<p>Mawar Setya Ningrum (2020) dengan judul, Pengembangan Wilayah Berbasis Pendekatan Sosial Ekonomi Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkembangan wilayah kabupaten Kediri yang berbasis ekonomi memiliki proporsi keragaman sektor perekonomian yang cukup baik. Terdapat tingkat kesenjangan pemerataan pendapatan penduduk. Dari tipologi wilayah yang menjadi wilayah penelitian, yakni</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut yaitu terletak dalam pengembangan wilayah dalam pendekatan sosiasal ekonomi. Perbedaanya yaitu pada lokasi penelitian dan sektor unggulannya.</p>

		<p>tipologi pegunungan memiliki kesenjangan lebih tinggi penduduknya, disusul daerah dataran rendah. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan menjadi aktivitas perekonomian utama di Kabupaten Kediri tidak diimbangi oleh aktivitas sektor industri pengolahan yang baik.</p>	
4	<p>Anita Karunia, Yusri Anis Faidah (2017) Strategi Pengembangan Wilayah Melalui Pemetaan Daya Saing Ekonomi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sektor yang memiliki keunggulan komparatif pada seluruh Kabupaten/Kota di Keresidenan Pekalongan</p>	<p>Persamaan penelitian tersebut yaitu terletak pada pengembangan wilayah yang melibatkan pada potensi daerahnya. Perbedaanya yaitu</p>

	Kawasan Keresidenan Pekalongan.	adalah sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor jasa perusahaan.	pada tempat penelitian dan potensi daerahnya.
5	Aan Nurhasanah, Bambang Juanda, Eka Intan Kumala Putri (2017) Dengan Judul, Analisis Kelayakan Dan Strategi Pengembangan Wilayah Dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Bogor Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bogor Timur layak untuk menjadi daerah otonom karena potensi ekonomi kemampuan fiskal yang tinggi, adapun potensi pendukung dalam pengembangan wilayah adalah pertanian	Persamaan penelitian tersebut yaitu terletak pada pengembangan wilayah yang melibatkan pada potensi daerahnya. Perbedaannya yaitu pada tempat penelitian dan potensi daerahnya.
6	Hendrianto Sundaro, Agus Sarwo Edy Sudrajat (2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Analisis Typologi	Persamaan penelitian tersebut yaitu terletak pada pengembangan

	<p>Dengan Judul, Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah</p>	<p>Klassen teridentifikasi bahwa hanya terdapat 1 sektor yang masuk dalam kategori sektor maju dan tumbuh cepat, sepuluh sektor masuk dalam kategori sektor maju namun tertekan dan 6 Sektor masuk dalam kategori sektor relatif tertinggal. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka arahan kebijakan pengembangan wilayah di Kota Semarang harus difokuskan pada sektor basis yang telah teridentifikasi sehingga Kota Semarang dapat berkembang sesuai</p>	<p>wilayah yang melibatkan pada potensi daerahnya. Perbedaanya yaitu pada tempat penelitian dan potensi daerahnya.</p>
--	---	---	--

		dengan potensi unggulan yang dimiliki.	
7	Herman Cahyo Diartho (2018) Dengan Judul, Pengembangan Wilayah Perdesaan Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Bondowoso.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa klasifikasi perkembangan desa serta potensi sumber daya alamnya, yaitu Potensi ekonomi kreatif, Potensi agribis padi organik, Potensi agribis kopi rakyat, potensi agroindustri tape dan ikan air tawar.	Persamaan penelitian tersebut yaitu terletak pada pengembangan wilayah yang melibatkan pada potensi daerahnya. Perbedaanya yaitu pada tempat penelitian dan potensi daerahnya.

*Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu*

## **1.2 Landasan Teori**

### **1.2.1 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah menurut Vincent Lemius merupakan suatu daerah yang memiliki kebebasan dalam mengambil ataupun membuat suatu keputusan politik atau lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam otonomi daerah terdapat kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah untuk menentukan apa yang akan menjadi kebutuhan daerah namun tetap disesuaikan dengan kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain : menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur urusan pemerintahan di luar yang menjadi

urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang Undang No.32 Tahun 2004. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu :

1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Aspek Kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional
3. Aspek Kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan wewenang dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri

Adapun Asas dalam otonomi daerah adalah sebagai berikut, Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara (Pasal 3 angka 2 UU No.28/1999). Asas Kepastian Hukum

yaitu asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara, Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (Pasal 3 angka 4 UU No.28/1999), Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 angka 6 UU No.28/1999), Asas Efisiensi, Asas Proporsionalitas, Asas Efektifitas. Asas Akuntabilitas. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintah dalam rangka otonomi daerah telah diberikan ruang yang cukup untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Pengelolaan kerjasama antar daerah tersebut dapat dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang pengaturannya dan pembentukannya dapat diatur dengan keputusan bersama antar daerah. Pemerintah pusat dapat menyediakan pelayanan publik apabila daerah belum atau tidak melakukan

kerjasama antar daerah. Kerjasama akan terjadi ketika pihak yang bekerjasama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi juga oleh faktor-faktor kemampuan pelaksana. Kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, faktor potensi dan geografi, dan kemampuan dalam organisasi. Secara garis besarnya pelaksanaan otonomi daerah ini meliputi pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan dan keanekaragaman sedangkan untuk politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan kewenangan urusan pemerintah yang tidak diberikan ke daerah lain (Josef Riwu Kaho, 2003:65) Prospek otonomi daerah kedepan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu aspek ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Aspek Ideologi mengandung bahwa pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, mengandung nilai-nilai pengakuan pada ketuhanan, persatuan, dan kesatuan terhadap hak asasi manusia, demokrasi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) dapat diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek Politik, adanya pemberian otonomi dan

kewenangan kepada daerah merupakan suatu wujud pengakuan dan kepercayaan ini dapat dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, setiap kebijakan otonomi daerah yang berkaitan dengan aspek politik merupakan suatu upaya pendidikan politik rakyat yang dampaknya pada peningkatan kehidupan politik di daerah. Aspek Ekonomi, dalam tujuan pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan daerah akan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di daerah yang berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta kebutuhannya. Kemudian otonomi daerah sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahnya dapat memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Aspek Sosial Budaya, nilai-nilai yang terkandung dalam aspek sosial budaya yang beranekaragam di daerah sebagai suku bangsa merupakan suatu nilai yang sangat penting bagi eksistensi daerah, bahwa dengan adanya pengakuan dari pemerintah pusat maka daerah akan merasa setara dan sejajar dengan

suku bangsa lainnya, hal ini sangat berpengaruh dalam upaya mempersatukan bangsa dan negara yang pada akhirnya nilai budaya lokal dengan keanekaragamannya akan memperkaya budaya nasional. Aspek Pertanian dan Keamanan, otonomi dengan kewenangannya dapat menetapkan kondisi ketahanan daerah dalam kerangka ketahanan nasional akan menumbuhkan kepercayaan daerah terhadap pusat.

### **1.2.2 Pengembangan Wilayah**

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat kepadatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah. Friedman dan Alonso (1978) mengemukakan bahwa pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor

internal dan eksternal yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomi. Dengan kata lain pengembangan wilayah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya. (Tri Utomo, 1999). Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merangsang perkembangan sosial ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah serta mengurangi kesenjangan antar wilayah (Zulaechah, 2011). Penerapan kebijakan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi potensi dan permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. (Susanto 2009). Tujuan utama pengembangan wilayah

adalah pemerataan pengembangan antar wilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi wilayah. Dalam upaya pengembangan wilayah tidak dapat dilakukan pengembangan terhadap semua sektor secara serentak akan tetapi diprioritaskan pada beberapa sektor yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan sektor yang memiliki potensi cukup besar itu. Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah ( Friedmann dan Allonso 1978)

Diperlukan strategi-strategi yang efektif untuk suatu percepatan pembangunan. Secara teoritis strategi pengembangan

wilayah dapat digolongkan dalam dua kategori : Strategi “*demand side*” yaitu suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah memingkatkan taraf hidup penduduk. Di dalam pendekatan *demand side strategy*, tujuan pengembangan wilayah dilakukan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk diharapkan akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang non pertanian. Adanya peningkatan tersebut akan meningkatkan perkembangan sektor industri dan jasa-jasa yang akan lebih mendorong perkembangan wilayah tersebut. Strategi “*supply side*” merupakan suatu strategi pengembangan wilayah yang terutama diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi keluar. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk meningkatkan pasokan dari komoditi yang pada umumnya diproses dari sumber daya alam lokal. Kegiatan produksi terutama ditujukan untuk ekspor yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan lokal, selanjutnya ini akan menarik kegiatan lain untuk datang ke wilayah

tersebut. Contoh dari strategi ini adalah strategi pengembangan eksploitasi sumber daya alam melalui penambangan.

### **1.2.3 Pengembangan Wilayah Berbasis Sosial Ekonomi**

Pengembangan wilayah merupakan salah satu hal yang penting dan harus ada dalam tujuan perencanaan daerah. Pengembangan wilayah perlu didasarkan pada potensi fisik, sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut. Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dalam skala nasional (Mulyanto, 2008). Tujuan dari pengembangan wilayah terdiri dari 2 aspek yaitu:

#### **1. Sosial**

Usaha-usaha mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga dan seluruh masyarakat di dalam wilayah tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan mengurangi pengangguran

dan menyediakan sarana dan prasarana kehidupan yang baik seperti pemukiman, fasilitas transportasi, kesehatan, air minum dan lainnya.

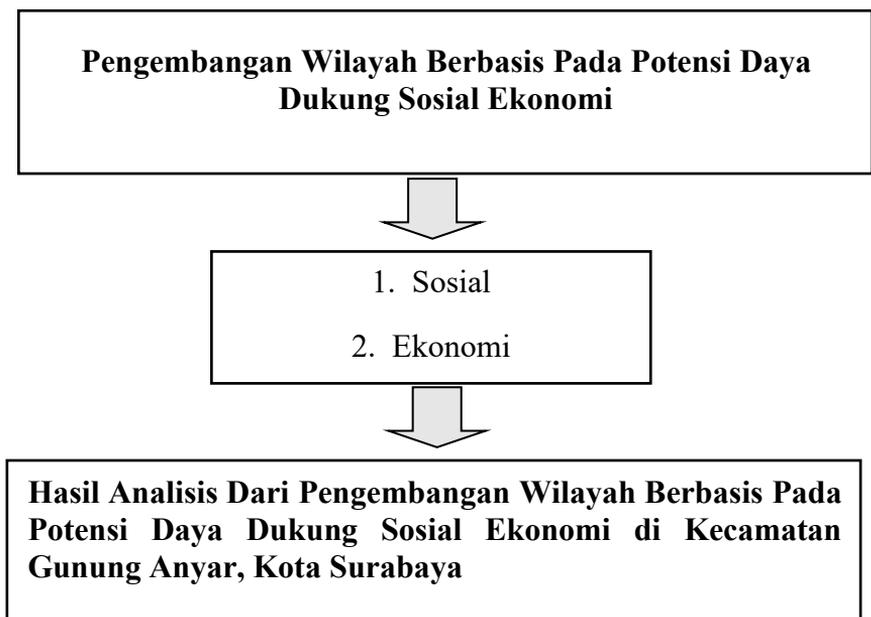
## 2. Ekonomi

Usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan pertumbuhan kesinambungan serta perbaikan kondisi-kondisi ekonomi yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada suatu wilayah dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga pengembangan wilayah berbasis sosial ekonomi adalah upaya dalam pembangunan wilayah yang memanfaatkan potensi unggulan dalam suatu daerah dan mencakup pada aspek sosial dan ekonomi.

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka dasar dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman tahapan tulisan dimana ditulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya. Pengembangan wilayah perlu didasarkan

pada potensi sosial dan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi- kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut (Mulyanto, 2008).



*Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran*